

BENCANA AKSI 2020

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA



**FIGHT AGAINST
X-CRIME**



BALAI GAKKUM KLHK SUMATERA



BALAI GAKKUM KLHK SUMATERA



GAKKUMSUMATERA.KLHK



BALAI GAKKUM KLHK SUMATERA





KATA PENGANTAR

Rencana Aksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM KLHK) tahun 2020 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Rencana Aksi ini memuat perencanaan dan prognosis per Triwulan di Tahun 2020 kedepan lingkup Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di dalam melaksanakan berbagai tugas yang di embankan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah TA 2020 dan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2020, dengan hasil sesuai rencana yang diharapkan dan secara keseluruhan dapat mencapai target dan sasaran yang telah di tetapkan dengan pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien.

Dengan Rencana Aksi ini diharapkan adanya optimalisasi peran Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera di dalam peningkatan efesiesian, efektifitas dan produktifitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera pada tahun tahun selanjutnya.

Kepala Balai Pengamanan dan
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Wilayah Sumatera,

Eduward Hutapea



BAB I PENDAHULUAN

Rencana Aksi (Renaksi) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Tahun 2020 adalah dokumen rencana aksi tahunan kelima yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, kebijakan yang akan digunakan serta program dan kegiatan yang diprioritaskan oleh GAKKUM LHK terutama pencapaian Sasaran Proyek Prioritas Nasional di dalam Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia. Bagi GAKKUM LHK yang terkait langsung dengan pencapaian prioritas nasional pada tahun 2020, maka program dan kegiatannya harus dapat secara langsung mencerminkan pencapaian prioritas nasional yang telah ditetapkan.

I.1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Rencana Aksi Penetapan Kinerja TA 2020 adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera. Tujuan dari Rencana Aksi ini adalah menyediakan peta jalan implementasi kegiatan lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.



Rencana aksi ini menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera.

I.II LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

- Undang Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.82 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020;
- Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.12 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.15/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan



BAB II RENCANA AKSI

Sesuai dengan perjanjian kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera, telah disampaikan bahwa kinerja Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah tersedianya instrumen dan regulasi untuk mendukung Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera. Hal ini dapat dilihat dari sasaran program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tabel berikut:

Rencana Aksi Kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2020, sebagai berikut;

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2020
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya Ditjen penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Dukungan Manajemen Esselon I	1 Layanan
	Layanan Perkantoran	1 Layanan
Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Luas kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan	400.000 Hektar
	Jumlah Operasi Hasil Hutan Illegal	21 Operasi
Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Usaha/Kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang LHK	160 Perusahaan
	Pengaduan yang masuk tertangani	
Penanganan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kasus Tindak Pidana LHK yg diselesaikan sampai dengan P-21	48 Kasus
	Kapasitas PPNS LHK yang ditingkatkan	4 Orang



BAB III PENUTUP

Tercapainya sasaran program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan didukung oleh kontribusi penuh dari unit kerja di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh karena itu, rencana aksi ini disusun sebagai acuan bagi pelaksana di lingkungan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera serta semua pemangku kepentingan dalam upaya penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan akibat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rencana aksi ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya pengembangan sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan kegiatan, dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi. Dengan disusunnya rencana aksi ini dapat mendorong penyelenggaraan program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai sasaran program yang sebaik- baiknya. Upaya yang dilakukan dengan dedikasi, kerja keras dan bersungguh-sungguh serta dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat diharapkan agar tujuan program maupun kementerian secara menyeluruh dapat tercapai.



BAB IV LAMPIRAN – LAMPIRAN

PROGNOSIS CAPAIAN KEGIATAN PER TRIWULAN BALAI PENGAMANAN DAN PENEKAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Triwulan				Target 2020	Satuan
	I	II	III	IV		
A. Pencegahan dan Pengamanan Hutan						
Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan (Target 400.000 Ha)					400.000	Hektar
Kawasan Hutan yang diamankan					8	Lokasi
Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan					400.000	Hektar
Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	36.160	93.680	135.320	134.840	400.000	Hektar
Jumlah Operasi Hasil Hutan Illegal	4	6	8	3	21	Operasi
Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan & Satwa Liar	5	7	8	3	24	Operasi
Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	7	11	13	5	36	Dokumen
Operasi Pembalakan Liar	2	3	4	3	12	Operasi
Penguatan Fungsi Pencegahan dan Pengamanan Hutan						
Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan hutan		1			1	Kegiatan
Peningkatan Kapasitas Polhut		1	2	1	4	Kegiatan
Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan					7	Kegiatan
B. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi						
Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi keataannya terhadap Peraturan Bidang LHK	14	38	54	53	160	Perusahaan
Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi yang ditangani	7	18	26	25	75	Perusahaan
Penanganan Pengaduan Perusahaan	5	12	17	17	50	Pengaduan
Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	11	29	41	40	120	Perusahaan
Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
C. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	10	13	12	13	48	Kasus
Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang di tangani	12	17	15	16	60	Kasus
Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK	16	22	20	22	80	Kasus
Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK	7	9	8	9	33	Kasus
PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya					4	Orang
Facilitasi penanganan kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan			1		1	Kasus
Peningkatan Kapasitas PPNS Bidang LHK			5		5	Orang
Dukungan Teknis Penegakan Hukum Pidana LHK		1	3	1	5	Kegiatan
Pra Peradilan Kasus Tindak Pidana LHK					12	Kasus

**PROGNOSIS CAPAIAN KEGIATAN PER BULAN BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA**

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Bulan Ke-												Satuan
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Luas kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan	0 ribu	8,16 ribu	28 ribu	29,68 ribu	32 ribu	32 ribu	40,44 ribu	48 ribu	46,88 ribu	48 ribu	50,84 ribu	36 ribu	Hektar
Jumlah Operasi Hasil Hutan Illegal	1	1	1	2	2	2	3	3	2	1	1	1	Operasi
Usaha/Kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang LHK	2	3	10	8	14	16	18	18	19	18	18	18	Perusahaan
Pengaduan yang masuk tertangani	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Pengaduan
Kasus Tindak Pidana LHK yg diselesaikan sampai dengan P-21	0	3	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	Kasus

- *Fleksibel (berdasarkan masuknya pengaduan)